



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## WACANA DIBERLAKUKANNYA KEMBALI UJIAN NASIONAL

**Fieka Nurul Arifa**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[fieka.arifa@dpr.go.id](mailto:fieka.arifa@dpr.go.id)

**Timothy Joseph Shekinah Glory**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[timothy.glory@dpr.go.id](mailto:timothy.glory@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ujian Nasional (UN) telah menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia selama lebih dari enam dekade. Fungsi utamanya adalah sebagai alat evaluasi dan standarisasi prestasi akademik di tingkat pendidikan dasar dan menengah, yang memungkinkan pemerintah untuk menilai kinerja siswa dan sekolah secara nasional.

Sejak diperkenalkan pada 1950-an, UN berfungsi bukan hanya sebagai syarat kelulusan, tetapi juga sebagai sarana bagi pemerintah untuk memantau pemerataan mutu pendidikan antarwilayah dan menerapkan intervensi di daerah yang membutuhkan perbaikan.

Di sisi lain, UN menimbulkan dampak stres akademik pada siswa berkaitan dengan aspek psikologis dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Bagi siswa, UN menghadirkan tekanan psikologis yang signifikan karena kerap dianggap sebagai penentu masa depan. Tekanan ini bisa menimbulkan kecemasan dan stres, terutama bagi siswa yang kurang siap menghadapi ujian dengan standar nasional. Terlebih, perbedaan akses dan fasilitas pendidikan di berbagai daerah menyebabkan kesenjangan dalam persiapan siswa. Siswa di daerah terpencil atau dari latar belakang ekonomi rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap bimbingan belajar dan materi tambahan. Tantangan ini semakin diperparah oleh perbedaan kualitas pengajaran yang membuat siswa sulit memahami materi ujian yang setara dengan sekolah-sekolah di perkotaan.

Selain itu, fokus pada persiapan UN dapat mengurangi waktu siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang lain. Pendidikan seharusnya mendukung pengembangan potensi anak secara menyeluruh, tetapi tekanan untuk lulus UN sering kali menggeser perhatian dari hal-hal yang juga penting bagi pertumbuhan siswa. Dukungan mental dan akademik yang memadai sangat dibutuhkan bagi siswa yang menghadapi tantangan akademik, agar mereka tetap percaya diri dan berprestasi.

Pada 2021, kebijakan UN dihapus oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) serta Survei Karakter. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban psikologis pada siswa dan mengalihkan fokus dari nilai angka semata ke keterampilan literasi dan numerasi.

Namun demikian, ketiadaan UN juga menimbulkan sejumlah tantangan. Tanpa instrumen ini, pemerintah menghadapi kesulitan dalam memperoleh gambaran menyeluruh tentang capaian akademik dan membandingkan performa sekolah di berbagai daerah. Sekolah dan guru juga kehilangan tolok ukur yang objektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, beberapa universitas luar negeri kini memperketat syarat penerimaan bagi siswa Indonesia, karena ketiadaan UN sebagai bukti formal kompetensi akademik, sehingga beberapa siswa harus mengikuti program pra-universitas untuk memenuhi standar internasional.

Wacana pemberlakuan kembali UN di Indonesia mencuat kembali di bawah pemerintahan baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, bersama Komisi X DPR RI, sedang mengkaji kemungkinan penerapan UN sebagai bagian dari evaluasi pendidikan nasional. Wacana ini dipicu oleh kebutuhan untuk menjaga standar dan kualitas pendidikan di seluruh daerah, seraya mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, pakar, dan masyarakat luas.

Jika diterapkan, UN diharapkan tidak akan sama seperti sebelumnya. Pemerintah harus menyeimbangkan pelaksanaan UN dengan tujuan pendidikan yang holistik serta mempertimbangkan kritik dari masyarakat mengenai relevansi UN di era pendidikan saat ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan desain yang lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan adaptasi. Format ini diharapkan dapat memberikan pengukuran yang lebih menyeluruh terhadap kemampuan siswa dan relevan dengan tuntutan global. Pengembalian UN juga berpotensi dikombinasikan dengan Asesmen Nasional (AN), yang berfokus pada kompetensi minimum dan survei karakter untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Saat ini, keputusan final masih dalam tahap pertimbangan dan diskusi lebih lanjut, karena ada kekhawatiran mengenai dampak stres akademik pada siswa dan kesiapan sistem pendidikan untuk melaksanakan evaluasi yang inklusif dan akuntabel.

## Atensi DPR

Menanggapi wacana diberlakukannya kembali UN, Komisi X DPR RI perlu bekerja sama dengan para pakar pendidikan untuk melakukan kajian mengenai dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kembali UN. Kajian ini perlu mencakup analisis data dari periode saat UN diterapkan hingga saat ditiadakan, serta perbandingan dengan pendekatan evaluasi lainnya seperti AN. Komisi X DPR RI dapat mendorong agar standar dan prosedurnya lebih adaptif, misalnya dengan tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan analitis. Komisi X DPR RI dapat mendorong agar jika diberlakukan kembali, UN tetap disinergikan dengan AN dan evaluasi internal di sekolah. Dengan demikian, evaluasi yang dihasilkan bisa lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada satu metode tes, tetapi juga pada pendekatan yang lebih beragam, seperti AKM dan survei karakter.

## Sumber

antaranews.com, 29 Oktober 2024;  
beritanasional.com, 29 Oktober 2024;  
kompas.com, 31 Oktober 2024; dan  
tekno.tempo.co, 1 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

